

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

*p-ISSN : 1907-2902 (Print)*

*e-ISSN : 2502-8537 (Online)*

### **PENGARUH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP *EMPLOYMENT TRANSITION*: ANALISIS SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL PADA TINGKAT INDIVIDU DI PULAU JAWA**

#### ***(THE EFFECT OF LOCAL ELECTION ON EMPLOYMENT TRANSITION: ANALYSIS OF FORMAL AND INFORMAL SECTORS AT INDIVIDUAL LEVEL IN JAVA ISLAND)***

**Beni Teguh Gunawan**

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Korespondensi penulis: [beni.teguh@gmail.com](mailto:beni.teguh@gmail.com)

#### ***Abstract***

*Local elections (pilkada) have become a political phenomenon which presumably may impact other sectors, including the employment and labour sector. This sector is one of the attractive commodities to be sold by the head of government, thus vulnerable to the interests of certain parties. Economic rationale is all too often used by the electoral candidate through promises to provide employment, and making it easier to attract sympathy from the unemployed. This paper presents the results of the study about the impact of the election on the employment transition. The analysed impact is the change in the employment sector one year before the election (t-1) until the year in which election was hold (t). This study analyzes the 2010 population census data with a multinomial logit (MNL) analysis approach. Empirical results show that district elections have a positive and significant effect on the transition from unemployment to working in the informal and formal sectors. While individuals who have previously worked in the formal sector tend to survive in the sector. On the other hand, it turns out that the district elections did not have a significant impact on individuals who previously worked in the informal sector*

*Keywords: local election, employment formal, informal, Java*

#### **Abstrak**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi fenomena politik yang diduga berdampak ke berbagai sektor lainnya, tak terkecuali sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu komoditas yang menarik untuk dijual oleh kepala pemerintahan, sehingga sektor inipun rentan terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu. Alasan ekonomi acapkali digunakan oleh calon kepala daerah melalui janji untuk menyediakan lapangan kerja, sehingga relatif lebih mudah menarik simpati para pengangguran. Tulisan ini memaparkan hasil kajian tentang dampak adanya pilkada terhadap *employment transition*. Dampak yang dilihat adalah perubahan sektor pekerjaan pada saat setahun sebelum pilkada dilakukan (t-1) hingga tahun yang sama saat pilkada dilakukan (t). Kajian ini menganalisis data sensus penduduk tahun 2010 dengan pendekatan analisis multinomial logit (MNL). Hasil empiris menunjukkan bahwa pilkada tingkat kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap transisi dari tidak bekerja menjadi bekerja di sektor informal dan formal. Sementara individu yang sebelumnya telah bekerja di sektor formal cenderung bertahan di sektor tersebut. Namun di sisi lain, pilkada tingkat kabupaten/kota ternyata tidak berdampak signifikan terhadap individu yang sebelumnya bekerja di sektor informal.

Kata Kunci: pemilihan kepala daerah, ketenagakerjaan, formal, informal, Jawa

**PENDAHULUAN**

Penelitian yang mengaitkan antara politik dan ketenagakerjaan telah dilakukan beberapa kali. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Charles & Stephens (2013) yang menggunakan data tingkat negara bagian di Amerika Serikat. Penelitian tersebut mengungkapkan pengaruh jumlah pekerja dan upah terhadap tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden dan gubernur. Hasil kajian tersebut juga menunjukkan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pemilihan presiden. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mechtel & Potrafke (2013) di Jerman, menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja cenderung tinggi untuk menarik simpati pemilih sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Beberapa penelitian terkait tentang *job creation* diantaranya oleh Jespersen, Munch, & Skipper (2008), menunjukkan pelatihan kerja memiliki pengaruh positif terhadap *employment* dan pendapatan.

Jika dikaji lebih dalam, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu dilakukan di negara maju, sehingga pendekatan *employment* dilakukan secara umum tanpa membedakan sektor, karena di negara maju hanya terdapat sektor formal dan tidak mengenal sektor informal.. Di negara berkembang, pekerja di sektor informal memiliki persentase yang jauh lebih besar (sekitar 70 persen) dibandingkan dengan sektor formal (Bosch & Esteban-Pretel, 2012). Pekerjaan di sektor informal cenderung lebih mudah untuk diperoleh akan tetapi rentan terhadap risiko kerja karena merupakan kelompok pekerja yang tidak terlindungi (Hohberg & Lay, 2015). Di Indonesia, jumlah pekerja sektor informal masih menjadi yang terbesar, bahkan menurut data Sakernas BPS bulan Agustus tahun 2015, sektor informal memiliki proporsi sebesar 76,12 persen dibandingkan seluruh pekerja. Sektor informal adalah salah satu sektor yang sangat rentan untuk diintervensi. Hal ini dikarenakan sektor informal dalam perjanjian kerjanya tidak berdasarkan pada kontrak maupun hal-hal lain yang tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Sehingga pekerja sektor informal lebih mudah untuk keluar-masuk pasar kerja.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor menjadi komoditas yang menarik bagi kepala pemerintahan (Lewis-Beck and Paldam, 2000; Mueller, 2003). Sektor ini rentan terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu terlebih dengan tingginya pengangguran di negara berkembang. Alasan ekonomi menjadi penyebab para pengangguran lebih tertarik dengan calon kepala daerah yang memberikan janji untuk bekerja, sehingga relatif lebih mudah untuk menarik simpati melalui tawaran pekerjaan.

Pemilihan kepala daerah diduga akan berdampak pada perekonomian, sebagaimana dikemukakan oleh Nordhaus (1975) yang dikenal dengan *Theory Business Cycle (PBC)*. Teori ini menunjukkan bagaimana perilaku pemerintahan untuk meningkatkan jumlah pemilih dalam menghadapi pemilihan umum dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Di Indonesia sendiri, pemilihan kepala pemerintah, baik itu tingkat pusat hingga kabupaten/kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tingkatan terendah pemilihan kepala daerah adalah kabupaten/kota untuk memilih bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota, kemudian tingkatan provinsi untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan tingkatan nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden. Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di tingkat nasional hingga kabupaten/kota.

Tulisan ini bertujuan memaparkan hasil kajian tentang dampak dari diadakannya pilkada, baik pada tingkatan kabupaten/kota maupun provinsi, terhadap *employment transition* di daerah tersebut. Dampak yang dilihat adalah perubahan sektor pekerjaan pada saat setahun sebelum pilkada dilakukan (t-1) hingga tahun yang sama saat pilkada dilakukan (t). Tingkatan analisis yang dilihat adalah tingkat individu, di mana transisi yang dilihat adalah dari tidak bekerja (N) ke bekerja sektor formal (F), tidak bekerja (N) ke bekerja sektor informal (I), tetap dalam kondisi tidak bekerja (N ke N), dari sektor informal (I) ke sektor formal (F), tetap pada sektor informal (I ke I), sektor informal (I) menjadi tidak bekerja (N), tetap di sektor formal (F ke F), sektor formal (F) ke sektor informal (I), dan dari sektor formal (F) menjadi tidak bekerja (N). Pemilihan umum tingkat nasional atau pemilu tidak disertakan dalam

analisis karena dampaknya tidak dapat dibedakan per daerah, melainkan satu negara.

Analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis multinomial logit (MNL), sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Agustus 2015. Data sekunder ketenagakerjaan tingkatan individu di Indonesia umumnya tersedia dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS dan *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) yang dilakukan oleh RAND. Sakernas memiliki keunggulan pada jumlah sampel dan adanya penimbang, sehingga lebih representatif untuk mewakili data ketenagakerjaan nasional. Sedangkan IFLS memiliki keunggulan pada kedalaman data dan metode pengamatan individu yang dilakukan secara panel. Karena penelitian ini menggunakan transisi hanya satu tahun, data Sakernas masih mampu untuk mengakomodasi.

## KERANGKA TEORI

Ada dua tipe dasar model mengenai hubungan politik ekonomi dengan ketenagakerjaan. Tipe pertama adalah *opportunistic* dan teori kedua adalah teori partisan. Tipe *opportunistic* mewakili individu politisi untuk meningkatkan peluangnya dalam pemilihan kepala daerah. Tipe politik partisan diwakili oleh teori partisan atau lebih dikenal dengan *partisan theory* (PT). Siklus bisnis politik partisan adalah fluktuasi dalam variabel ekonomi makro setelah atau antara periode elektoral yang dihasilkan oleh para pemimpin yang berbeda tujuan kebijakan.

Teori *political business cycle* (PBC) pertama kali dikemukakan oleh Nordhaus pada tahun 1975. Teori ini meletakkan dasar struktur perekonomian pada kurva Philips. Teori ini menunjukkan bagaimana perilaku pemerintahan dalam menghadapi pilkada terkait dengan ketenagakerjaan. Kurva Philips menggambarkan hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek (Rogoff, 1990). Teori PBC merupakan gambaran bagaimana upaya calon kepala daerah dalam meningkatkan elektabilitasnya.. Teori PBC menggambarkan bahwa pada umumnya *voter* hanya melihat kinerja calon kepala daerah dalam jangka pendek.

Penilaian jangka pendek ini menjadi dasar bagi calon kepala daerah untuk meningkatkan jumlah *voter*. Peluang terpilih diasumsikan sebagai bentuk kepuasan *voter* terhadap kinerja calon kepala daerah (Shi & Svensson, 2006). Dalam hal ini, calon petahana lebih diuntungkan dibandingkan calon non-petahana, karena calon petahana memiliki kontrol terhadap fiskal, sehingga program-program kerjanya diarahkan untuk meningkatkan elektabilitas yang bersangkutan. Kondisi perekonomian yang meningkat dalam *short-run* ditandai dengan peningkatan inflasi, pun demikian perekonomian yang meningkat akan memengaruhi sektor ketenagakerjaan karena semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia.

*Partisan theory* (PT) pertama kali dikemukakan oleh Hibbs tahun 1977. Konsep PT hampir sama dengan PBC, PT lebih bersifat ideologis terkait dengan partai-partai yang terlibat dalam pilkada. *Non rational expectation* menjadi dasar dari masing-masing partai politik dalam memaksimalkan *utility* kelompoknya. *Partisan theory* pada umumnya berlaku secara empiris, jika dalam kondisi inflasi berada dalam kecenderungan tinggi dan pengangguran dalam kondisi kecenderungan rendah. Akan tetapi, kondisi inflasi yang tinggi dalam *long-run* akan berdampak buruk pada perekonomian (Mankiw, 2001). Calon pemimpin yang menganggap bahwa *voter* adalah sebuah investasi akan berpikir jauh ke depan dan tidak akan memanfaatkan kondisi perekonomian jangka pendek untuk meningkatkan elektabilitasnya. Hal ini tentu berlawanan dengan calon kepala daerah yang hanya bertujuan untuk meningkatkan popularitas sesaat. Jika didasarkan pada teori PBC, sektor ketenagakerjaan adalah sektor yang menarik untuk diintervensi. Pengurangan pengangguran dalam jangka pendek akan memberikan opini positif kepada calon kepala daerah. Dan sektor informal sebagai sektor yang lebih mudah untuk diciptakan dan dihapuskan adalah pilihan yang paling realistis. Sifat dari sektor informal sering disebut sebagai *unregulated jobs* karena cenderung tidak mengikuti regulasi dan tidak terkendala birokrasi pemerintahan (Ulysees, 2010).

Sektor pekerjaan di negara berkembang terbagi menjadi sektor formal dan informal. Sektor formal diasumsikan sebagai sektor yang normatif,

mengikuti prinsip-prinsip dan aturan ketenagakerjaan. Sementara sektor informal cenderung dipandang sektor yang lemah dalam hal penerapan aturan ketenagakerjaan. Jika dikaitkan dengan teori PBC dan PT, sektor yang rentan terhadap intervensi adalah sektor informal. Melihat tingginya jumlah pekerja informal di negara berkembang khususnya di Indonesia, diasumsikan teori PBC dan PT ini juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah.

Data Sakernas yang digunakan dalam penelitian ini dirilis oleh BPS dua kali dalam satu tahun, yaitu Februari dan Agustus. Tulisan ini menggunakan data Sakernas bulan Agustus karena memiliki sampel yang lebih besar sehingga dapat merepresentasikan tingkat kabupaten/kota. Data tentang pemilihan kepala daerah termasuk calon pesertanya diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengaruh pilkada terhadap pola ketenagakerjaan sektor formal dan informal dilihat secara individu per angkatan kerja pada saat t-1 dan t, di mana t adalah tahun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Analisis empiris akan menggunakan analisis regresi multinomial logit (MNL) dengan variabel dependen adalah transisi dari tidak bekerja (N) ke bekerja sektor formal (F), tidak bekerja (N) ke bekerja sektor informal (I), tetap dalam kondisi tidak bekerja (N ke N), dari sektor informal (I) ke sektor formal (F), tetap pada sektor informal (I ke I), sektor informal (I) menjadi tidak bekerja (N), tetap di sektor formal (F ke F), sektor formal (F) ke sektor informal (I), dan dari sektor formal (F) menjadi tidak bekerja (N).

Daerah yang dianalisis dalam studi ini adalah wilayah Jawa karena Jawa merupakan konsentrasi penduduk di Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, sebanyak 57,48 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Sedangkan pemilihan dikaji untuk jangka waktu 2014-2015, karena pada tahun tersebut telah terwakili rentang waktu selama dan setelah pemilihan umum presiden dan legislatif. Pada kondisi tertentu, pilkada untuk tingkatan kabupaten/kota dan provinsi dilaksanakan bersamaan, hal ini tergantung pada berakhirnya masa jabatan masing-masing kepala daerah. Pembahasan yang

mendalam mengenai pekerja sektor formal dan informal perlu dilakukan untuk mengetahui definisi yang pasti dalam membedakan kelompok pekerja sektor formal dan informal.

### **Definisi Formal Dan Informal**

Tinjauan terhadap tenaga kerja formal secara tidak langsung akan memberikan gambaran tentang definisi pekerja informal, demikian pula sebaliknya. Ditinjau dari tingkat kompleksitas, pekerja sektor informal memiliki sejumlah hal yang tidak dimiliki sektor formal. Dalam tinjauan ini fokus pada pekerja informal, sehingga kategori yang tidak termasuk dalam definisi informal dapat diartikan masuk ke dalam sektor formal.

Husmanns, (2004) memberikan gambaran mengenai definisi pekerja yang termasuk dalam kategori informal, yaitu

- a. Mereka yang dipekerjakan di sektor informal, meliputi:
  - 1) Pekerja yang berusaha sendiri pada perusahaan miliknya;
  - 2) Pemberi kerja pada perusahaan informal;
  - 3) Pekerja pada sektor informal;
  - 4) Pekerja keluarga yang bekerja pada perusahaan informal;
  - 5) Anggota jaringan produsen informal/koperasi informal.
- b. Pekerja informal yang bekerja di luar sektor informal, khususnya:
  - 1) Pekerja pada sektor formal yang tidak terlindungi oleh perlindungan sosial, tidak terdaftar secara resmi, atau tidak mendapatkan hak pekerja seperti gaji tahunan atau cuti sakit yang tetap dibayar;
  - 2) Pekerja rumah tangga bayaran yang tidak terlindungi dan tidak mendapat hak-hak pekerja seperti di atas;
  - 3) Anggota rumah tangga yang dipekerjakan di perusahaan formal.

Selain definisi-definisi tersebut, ILO, et al (2013) juga menyertakan pekerja yang memproduksi barang secara khusus digunakan untuk kegunaan akhir di rumah tangga mereka, seperti pertanian subsisten/gurem untuk konsumsi sendiri sebagai pekerja informal

**DATA DAN SPESIFIKASI EMPIRIS**

Pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung pertama kali dilakukan setelah masa reformasi, lebih spesifik lagi sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota pada tingkat kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur untuk tingkat provinsi.

Masa pemerintahan kepala daerah di Indonesia adalah 5 (lima) tahun dengan opsi mencalonkan kembali pada periode berikutnya. Sebelum tahun 2017, pilkada dilakukan secara parsial berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi. Pilkada serentak baru diberlakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 3 tahun 2016 di seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya telah usai. Informasi segala sesuatu tentang pemilihan daerah diperoleh dari KPU, sedangkan data pendukung untuk ketenagakerjaan diperoleh dari Sakernas.

Variabel bebas atau kovariat utama yang digunakan adalah ada atau tidaknya pilkada di suatu kabupaten/kota dan provinsi pada tahun

$$P_{jk,t(i)} = P(Y_{t,i} = k | Y_{t-1,i} = j) \dots\dots\dots(1)$$

Transisi antar waktu dengan *m* state dapat ditunjukkan dalam matriks berdimensi *m* x *m*, di

$$P(Y_t = F | Y_{t-1} = F) + P(Y_t = I | Y_{t-1} = F) + P(Y_t = N | Y_{t-1} = F) = 1 \dots\dots\dots(2)$$

di mana dalam studi ini akan menggunakan tiga state baik saat t-1 maupun t, yaitu tidak bekerja

2015. Kovariat kedua adalah karakter spesifik individu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan status perkawinan. Tingkat pendidikan dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan yaitu SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat dan perguruan tinggi. Sedangkan kategori tidak bersekolah dimasukkan dalam kelompok SD/ sederajat. Kovariat ketiga adalah karakteristik lokal kabupaten/kota setempat yang meliputi PDRB untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu kabupaten/kota, jumlah penduduk usia kerja dan nilai upah minimum kabupaten dalam bentuk logaritma.

Analisis empiris yang digunakan dalam studi ini adalah regresi multinomial logit (MNL) dengan pendekatan Markov Chain. Asumsikan *i*=1,2...*n* adalah indeks yang menggambarkan sampel individu ke-*i* dalam suatu pengamatan. Jika *state* pada saat t-1 berada di *j* dan *state* pada saat t berada di *k*, maka *P<sub>jk</sub>* disebut peluang transisi (Meyn & Tweedie, 1993). Dengan demikian, probabilitas seorang individu berada di *state* *j* pada saat t-1 dan berpindah ke *state* *k* pada saat t adalah

mana  $\sum_{k=1}^m P_{jk,t} = 1$ , atau dalam matriks transisi ditunjukkan dalam Tabel 1 pada baris pertama

(N), bekerja di sektor informal (I) dan bekerja di sektor formal (F).

Tabel 1. Matriks transisi antara t-1 dan t

| t-1 | t   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | F   | I   | N   |
| F   | P (Y <sub>t</sub> =F   Y <sub>t-1</sub> =F) | P (Y <sub>t</sub> =I   Y <sub>t-1</sub> =F) | P (Y <sub>t</sub> =N   Y <sub>t-1</sub> =F) |
| I   | P (Y <sub>t</sub> =F   Y <sub>t-1</sub> =I) | P (Y <sub>t</sub> =I   Y <sub>t-1</sub> =I) | P (Y <sub>t</sub> =N   Y <sub>t-1</sub> =I) |
| N   | P (Y <sub>t</sub> =F   Y <sub>t-1</sub> =N) | P (Y <sub>t</sub> =I   Y <sub>t-1</sub> =N) | P (Y <sub>t</sub> =N   Y <sub>t-1</sub> =N) |

Probabilitas transisi individu antar waktu menjadi heterogen karena dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing individu dalam pasar kerja. Pengaruh variabel independen atau kovariat dapat diketahui sebagaimana pada orde pertama MC

dengan *X<sub>t</sub>* adalah vektor yang menjelaskan variabel independen masing-masing individu maupun regional. Sehingga persamaan probabilitas bersyarat dapat ditunjukkan dengan

$$P_{jk,t(i)} = P(Y_{t,i} = k | Y_{t-1,i} = j, X_{t,i}) \dots\dots\dots(3)$$

Pertama, pengamatan akan dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan baris yang mewakili *state* pada saat t-1. Untuk notasi, akan digunakan angka 1 hingga 3, di mana berurutan mewakili status tidak bekerja, bekerja sektor informal dan formal. Masing-masing kelompok mewakili sebuah persamaan MNL dengan m pilihan yang merupakan *state* pada saat t. Seperti dalam model logit biasa, ide dasar MNL adalah untuk

mengekspresikan *log-odds* ( $p_{jk(t)}/p_{jr(t)}$ ) dikaitkan dengan basis/referensi sebagai fungsi linear dari vektor kovariat. Menurut Nylund (2007), dalam MNL dengan menggunakan kovariat, pada individu i di mana pada saat t-1 berada di *state* j dan pada saat t berada di *state* k, secara umum dapat menggunakan persamaan MNL

$$g_k(X_{t,i}) = \log \left( \frac{P(Y_{t,i} = k | Y_{(t-1),i} = j, X_{t,i})}{P(Y_{t,i} = k^* | Y_{(t-1),i} = j, X_{t,i})} \right) = \beta_{k0} + \beta_{k1}X_{1i} + \dots + \beta_{kp}X_{pi} \quad (4)$$

atau

$$P(Y_{t,i} = k | Y_{(t-1),i} = j, X_{t,i}) = \begin{cases} \frac{1}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} & \text{untuk } k = r \\ \frac{\exp(g_k(X_{t,i}))}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} & \text{untuk } k \neq r \end{cases} \dots\dots\dots(5)$$

Pada saat k=r maka  $g_r(X_{t,i}) = 0$ , sehingga  $\exp(g_k(X_{t,i})) = 1$ . Dalam model ini akan selalu diasumsikan r=j, yang dimaksudkan untuk menjadikan *state* pada saat t-1 pada masing-masing kelompok sebagai basis.

Pendugaan parameter dalam MNL menggunakan *maximum likelihood estimation* (MLE) Jika terdapat 3 alternatif pilihan saat t, maka *multinomial density* untuk satu observasi adalah

$$f(y) = p_1^{y_1} \cdot p_2^{y_2} \cdot p_3^{y_3} = \prod_{r=1}^3 p_r^{y_r} \dots\dots\dots(6)$$

Fungsi *likelihood* untuk N individu dengan 3 alternatif pilihan mengadopsi model dalam Cameron & Trivedi (2005) adalah

$$L = \prod_{i=1}^N [\prod_{r=1}^3 P_{ir}^{y_{ir}}] \dots\dots\dots(7)$$

Dengan salah satu dari k menjadi basis, akan diperoleh persamaan

$$L = \prod_{i=1}^N \left[ \prod_{r=1}^3 \left[ \frac{\exp(g_k(X_{t,i}))}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} \right]^{y_{ir}} \left[ \frac{1}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} \right]^{y_{i0}} \right] \dots\dots\dots(8)$$

Dengan transformasi fungsi logaritma pada kedua sisinya akan diperoleh persamaan *loglikelihood* dengan pendugaan nilai parameter  $\beta$ .

pengaruh variabel independen tertentu terhadap probabilitas suatu pilihan. *Marginal effect* dapat diketahui dari variabel independen berupa data diskrit maupun kontinyu. *Marginal effect* variabel kontinyu dapat diketahui dengan turunan pertama model persamaan (6) terhadap variabel independen tertentu.

Dalam model MNL interpretasi koefisien tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui *marginal effect* yang menunjukkan

$$\frac{\partial P_{ik}}{\partial X_i} = P_{ik}(\beta_{pk} - \sum_r \beta_{pr} P_{ir}) \dots\dots\dots(9)$$

Jika dianalogikan dalam penelitian ini, peluang transisi seseorang misalnya berada di sektor formal pada saat t-1 dan berada di sektor informal pada

saat t akibat pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota domisili adalah

$$P_{informal|formal,t(i)} = P(Y_{t,i} = informal | Y_{t-1,i} = formal, dkab_{t,i}) = P_{i,dkab} (\beta_{dkab,informal} - (\beta_{ln\_umk,informal} + \beta_{ln\_pdrb,informal} + \beta_{puk,informal} + \beta_{deduc1,informal} + \beta_{deduc2,informal} + \beta_{deduc3,informal} + \beta_{jk,informal} + \beta_{dkawin,informal})) \dots\dots\dots(10)$$

Setiap variabel independen diamati sebagai amatan waktu ke-t, sehingga untuk tahun 2010, data yang digunakan adalah karakteristik individu dan regional pada tahun 2010, demikian juga untuk

tahun 2015. Restriksi yang dilakukan dalam data Sakernas yang pertama adalah data yang berasal dari responden Pulau Jawa. Definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

| Nama variabel | Penjelasan   |
|---------------|--|
| dkab          | Variabel utama <i>dummy</i> pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bernilai 1 jika di kabupaten/kota tersebut melaksanakan pemilihan kepala daerah saat tahun t dan 0 untuk selainnya  |
| ln_umk        | Variabel upah minimum dalam bentuk logaritma   |
| ln_pdrb       | Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) dalam bentuk logaritma pada saat t berdasarkan lapangan usaha dengan menyertakan sektor migas sebagai variabel kontrol kondisi perekonomian daerah  |
| puk           | Variabel puk merupakan rasio antara total penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun terhadap total penduduk di suatu daerah yang digunakan sebagai kontrol regional untuk mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja dalam pasar kerja   |
| umur          | Variabel umur diperoleh dari nilai absolut individu pada saat t. Dalam Sakernas tahun 2015, variabel umur terletak di poin pertanyaan b4_k5  |
| deduc1        | Variabel kontrol yang disertakan adalah <i>dummy</i> pendidikan, bernilai 1 jika pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SD atau tidak pernah bersekolah dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, pendidikan berada di poin pertanyaan b5_r1a. Pendidikan setara SD atau lebih rendah memiliki kode 1, 2, 3 dan 4 |
| deduc2        | Variabel kontrol yang disertakan adalah <i>dummy</i> pendidikan menengah pertama, bernilai 1 jika pendidikan yang ditamatkan adalah SLTP dan sederajat dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, pendidikan berada di poin pertanyaan b5_r1a. Pendidikan setara SLTP atau sederajat memiliki kode 5, 6, dan 7         |
| deduc3        | Variabel kontrol yang disertakan adalah <i>dummy</i> pendidikan menengah atas, bernilai 1 jika pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA dan sederajat dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, pendidikan berada di poin pertanyaan b5_r1a. Pendidikan setara SLTA atau sederajat memiliki kode 8, 9, dan 10           |

|        |  |
|--------|--|
| jk     | <i>Dummy</i> jenis kelamin, bernilai 1 jika berjenis kelamin laki-laki dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, jenis kelamin berada di poin pertanyaan b4_k4        |
| dkawin | <i>Dummy</i> status perkawinan, bernilai 1 jika status perkawinan menikah dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, status perkawinan berada di poin pertanyaan b4_k6 |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sebaran data, baik data pada variabel dependen maupun independen. Karena data yang digunakan dalam studi ini merupakan data survei sehingga untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan menggunakan penimbang. Penimbang dimaksudkan untuk mewakili beberapa pengamatan dalam populasi pada pengamatan sampel. Total sampel yang digunakan sebanyak 526.030.

Setelah data Sakernas direstriksi berdasarkan kategori usia 15-65 tahun, jumlah observasi tersisa sebanyak 93,25 persen. Jumlah observasi tanpa penimbang tahun 2010 pada restriksi kedua berdasarkan total pengamatan pulau Jawa secara sampel sebanyak 29,16 persen. Pengamatan secara populasi dengan penimbang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah transisi antar *state* antara  $t-1$  dan  $t$ . Dari struktur antar *state* dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dan 2015 jumlah individu yang tidak bekerja menjadi mayoritas diantara lainnya. Proporsi pekerja formal menurun antar tahun 2014-2015, akan tetapi meningkat jika dilihat berdasarkan kelompok data tahun 2015.

Tabel 3 Jumlah Observasi Tahun 2015

| Kelompok data             | Observasi       |            |                  |            |
|---------------------------|-----------------|------------|------------------|------------|
|                           | Tanpa penimbang | Persentase | Dengan penimbang | Persentase |
| Total observasi           | 526.030         | 100,00     | 186.100.917      | 100,00     |
| Kategori usia 15-65 tahun | 490.547         | 93,25      | 174.238.603      | 93,63      |
| Total pengamatan di Jawa  | 153.369         | 29,16      | 100.790.136      | 54,16      |

Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2015

Analisis secara deskriptif juga dilihat pada variabel independen, pada kelompok ini juga dilihat berdasarkan variabel independen bersifat kontinyu maupun *dummy*. Pada kategori variabel independen kontinyu adalah upah minimum riil (umriil), umur, pdrb, dan puk, sedangkan pada kategori *dummy* adalah jenis kelamin (djk), deduc1, deduc2, deduc3, dan statk. Nilai upah minimum riil terkecil adalah 8937,121 dan terbesar adalah 25129,15 dengan rata-rata 14208 dan standar deviasi 5115,937. Variabel umur, sebagaimana telah dibatasi sebelumnya hanya pada kisaran 15 hingga 65 tahun dengan rata-rata 38,46 tahun. Analisis deskriptif pada variabel *dummy* jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Sedangkan dari status pernikahan, sebagian besar observasi merupakan individu yang telah menikah yang mencapai perbandingan 69,28 dan 30,72.

Dari *dummy* pendidikan dapat terlihat bahwa mayoritas observasi memiliki pendidikan SD/ sederajat atau tidak pernah bersekolah pada tahun 2015. Sedangkan jumlah terendah pada kedua kelompok tahun berada pada tingkat pendidikan tinggi.

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan kecenderungan bahwa transisi yang terjadi adalah perpindahan dalam *state* yang sama antara  $t-1$  dan  $t$ . Akan tetapi, dari pengamatan secara deskriptif tersebut tidak dapat disimpulkan secara tepat bagaimana pengaruh upah minimum terhadap transisi yang terjadi. Untuk informasi lebih lanjut dilakukan uji empiris untuk mengetahui dengan pasti pengaruh upah minimum terhadap *employment transition*.

**b. Hasil Analisis Empiris**

Hasil analisis empiris menggunakan regresi MNL disajikan pada Tabel 4. Hasil tersebut membuktikan bahwa pengaruh pilkada terhadap *employment transition* berbeda antara daerah yang mengadakan pilkada dengan daerah yang tidak

mengadakan pilkada. Pilkada berdampak signifikan terhadap *employment transition* hampir di semua perpindahan sektor kecuali dari sektor informal ke tidak bekerja (I ke N), tetap di sektor informal (I ke I) dan dari sektor informal ke sektor formal (I ke F).

Tabel 4 *Marginal Effect* Dampak Pemilihan Kepala Daerah

| State saat t-1 | State saat t  |            |          |
|----------------|---------------|------------|----------|
|                | Tidak Bekerja | Informal   | Formal   |
| Tidak bekerja  | -0,0126***    | 0,0108***  | 0.0018*  |
| Informal       | -0,0017       | 0,0028     | -0,0006  |
| Formal         | -0,0042*      | -0,0053*** | 0,0095** |

Keterangan:

\*\*\*=signifikan pada alpha 1%, \*\*=signifikan pada alpha 5%, \* = signifikan pada alpha 10%

Pada kelompok rata-rata diperoleh hasil *marginal effect* sebanyak 9 nilai untuk masing-masing tahun. Nilai-nilai tersebut menunjukkan hubungan dan besaran pengaruh upah minimum terhadap masing-masing transisi. Interpretasi dari nilai *marginal effect* tahun 2010 adalah:

- a. Pada transisi N ke N pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk tetap tidak bekerja sebesar 0,0126 poin
- b. Pada transisi N ke I pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk berpindah dari tidak bekerja menjadi bekerja ke sektor informal sebesar 0,0108 poin
- c. Pada transisi N ke F pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk berpindah dari tidak bekerja menjadi bekerja ke sektor formal sebesar 0,0018 poin
- d. Pada transisi I ke N pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan tidak signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor informal menjadi tidak bekerja sebesar 0,0017 poin
- e. Pada transisi I ke I pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan tidak signifikan, di

mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk tetap di sektor informal sebesar 0,0028 poin

- f. Pada transisi I ke F pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan tidak signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor informal menjadi sektor formal sebesar 0,0006 poin
- g. Pada transisi F ke N pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor formal menjadi tidak bekerja sebesar 0,0042 poin
- h. Pada transisi F ke I pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor formal menjadi sektor informal sebesar 0,0053 poin
- i. Pada transisi F ke I pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk tetap bekerja di sektor formal sebesar 0,0095 poin

Selain variabel utama pelaksanaan pilkada, dalam pembahasan ini juga akan ditampilkan pengaruh variabel-variabel independen lainnya. Variabel-variabel independen tersebut akan dibagi menjadi

2 kelompok untuk menunjukkan indikator makro dan mikro. Variabel independen yang menunjukkan indikator makro adalah upah minimum kabupaten/kota (ln\_UMK), produk domestik regional bruto (ln\_PDRB), dan penduduk usia kerja (PUK). Sementara itu, variabel

independen yang menunjukkan indikator mikro adalah variabel yang melekat pada masing-masing individu, yaitu umur, pendidikan (deduc1, deduc2, dan deduc3), jenis kelamin (jk), dan status perkawinan (dkawin).

Tabel 5 *Marginal Effect* Variabel Makro

| State saat t-1 | State saat t  |              |             |
|----------------|---------------|--------------|-------------|
|                | Tidak Bekerja | Informal     | Formal      |
|                |               | ln_umk       |             |
| Tidak Bekerja  | 0,1297903**   | -0,1319827** | 0,0021925   |
| Informal       | -0,0150522**  | 0,0116359**  | 0,0034163*  |
| Formal         | -0,0112107**  | -0,0246872** | 0,0358979** |
|                |               | ln_pdrb      |             |
| Tidak Bekerja  | 0,0153521**   | -0,0148472** | -0,0005049  |
| Informal       | 0,0094227**   | -0,0112303** | 0,0018076*  |
| Formal         | 0,0013005     | -0,0004596   | -0,0004596  |
|                |               | puk          |             |
| Tidak Bekerja  | -0,0000151**  | 0,0000126**  | 0,00000253* |
| Informal       | -0,00000782** | 0,00000632** | 0,00000149  |
| Formal         | -0,00000279   | 0,00000607** | -0,00000328 |

Keterangan:

\*\*=signifikan pada alpha 1%, \* = signifikan pada alpha 10%

Pada variabel indikator makro UMK, transisi pekerja dari tidak bekerja ke formal tidak signifikan, sementara transisi lainnya signifikan. Kondisi yang sama juga terjadi variabel PDRB. Sementara untuk variabel PUK, justru transisi dari tidak bekerja ke formal signifikan. Artinya, setiap kenaikan 1 persen penduduk usia kerja dibandingkan dengan total penduduk suatu kabupaten/kota akan meningkatkan kemungkinan pencari kerja untuk bekerja di sektor formal

sebesar 0,00000253. Hampir semua transisi pada variabel makro signifikan pada transisi dari tidak bekerja dan dari informal. Pada variabel UMK, hampir semua transisi berdampak signifikan, kecuali dari tidak bekerja ke sektor formal. Sementara itu, untuk variabel PDRB, transisi dari sektor formal tidak signifikan ke semua sektor. Pada variabel PUK, ada dua transisi yang tidak signifikan, yaitu dari informal ke formal dan dari formal ke formal.

Tabel 6 *Marginal Effect* Variabel Mikro

| State saat t-1 | State saat t  |            |            |
|----------------|---------------|------------|------------|
|                | Tidak Bekerja | Informal   | Formal     |
|                |               | umur       |            |
| Tidak Bekerja  | -0,00044**    | 0,001473** | -0,00103** |
| Informal       | -0,00099**    | 0,001628** | -0,00064** |
| Formal         | -0,00188**    | -0,00033** | 0,002208** |
|                |               | deduc1     |            |
| Tidak Bekerja  | -0,15827**    | 0,201504** | -0,04323** |
| Informal       | 0,031225**    | -0,02526** | -0,00597** |
| Formal         | 0,03323**     | 0,028742** | -0,06197** |
|                |               | deduc2     |            |
| Tidak Bekerja  | -0,07276**    | 0,120559** | -0,0478**  |
| Informal       | 0,026772**    | -0,02348** | -0,00329   |
| Formal         | 0,044382**    | 0,024936** | -0,06932** |
|                |               | deduc3     |            |
| Tidak Bekerja  | -0,05706**    | 0,074161** | -0,0171**  |

| State saat t-1 | State saat t  |            |            |
|----------------|---------------|------------|------------|
|                | Tidak Bekerja | Informal   | Formal     |
| Informal       | 0,021191**    | -0,0215**  | 0,000312   |
| Formal         | 0,039139**    | 0,014126** | -0,05326** |
|                |               | jk         |            |
| Tidak Bekerja  | -0,18016**    | 0,1767**   | 0,003457** |
| Informal       | -0,01535**    | 0,006912** | 0,008433** |
| Formal         | -0,02988**    | 0,009572** | 0,020309** |
|                |               | dkawin     |            |
| Tidak Bekerja  | -0,12757**    | 0,141254** | -0,01369** |
| Informal       | -0,02465**    | 0,026441** | -0,0018    |
| Formal         | -0,01269**    | 0,000428   | 0,012263** |

Keterangan:

\*\*=signifikan pada alpha 1%

Berbeda dengan variabel makro, pada variabel mikro hampir semua transisi signifikan. Hanya ada empat transisi yang tidak signifikan dari total 54 transisi pada variabel mikro ini, yaitu pada transisi dari informal ke formal pada variabel *dummy* deduc2. Transisi yang sama juga tidak signifikan pada variabel deduc 3 dan *dummy* kawin.

## PEMBAHASAN

Analisis empiris memperlihatkan pengaruh pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, baik sektor formal maupun yang tidak bekerja. Adanya pilkada membuat peluang bekerja seseorang yang tidak bekerja menjadi lebih besar. Tingkat peluang seseorang untuk bekerja pada saat pilkada dilaksanakan lebih besar pada sektor informal daripada sektor formal. Sementara untuk individu yang telah bekerja di sektor formal cenderung untuk bertahan di sektor tersebut dan memiliki kemungkinan negatif untuk beralih menjadi tidak bekerja maupun ke sektor informal. Seperti yang telah diduga dalam teori, bahwa sektor informal merupakan sektor yang lebih mudah untuk diintervensi karena sektor ini merupakan *unregulated sector* yang cenderung tidak terikat oleh aturan-aturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mechtel dan Potrafke (2013), di mana calon kepala pemerintahan selalu memiliki motif dan pengaruh terhadap pasar kerja. Bentuk politisasi tersebut selalu menjadikan pengangguran sebagai obyek., Tulisan ini, secara lebih spesifik juga menunjukkan bahwa sektor tenaga kerja yang dijadikan obyek oleh calon kepala daerah adalah sektor informal. Tulisan ini juga memberikan gambaran lain bahwa kondisi ketenagakerjaan di negara berkembang

relatif berbeda dengan di negara maju, meskipun secara keseluruhan dampak yang ditimbulkan relatif sama.

Sjahrir, Kis-Katos, dan Schulze. (2013) menemukan bahwa pengaruh dari PBC untuk di wilayah Indonesia hanya terjadi pada saat pemilihan secara langsung, namun tidak terjadi pada pemilihan secara tidak langsung, serta pengaruhnya lebih besar pada saat calon petahana kembali mencalonkan diri. Temuan Choi (2011) juga mengindikasikan hal serupa, di mana pilkada di Indonesia tidak lebih dari mempertahankan dominasi dan bahkan membentuk dinasti politik di suatu daerah. Di beberapa wilayah di Indonesia, gerakan kekerasan dimobilisasi melawan musuh etnis, apakah musuh-musuh ini adalah komunitas yang saingan (seperti konflik komunal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta Maluku Utara) atau negara (seperti dalam gerakan separatist di Aceh dan Papua) (Aspinall, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak fenomena kompleks yang timbul akibat adanya pelaksanaan pilkada, bukan hanya dari sisi ekonomi saja. Rinakit (2005) menemukan bahwa dari hasil observasi di 90 daerah, dengan rincian 4 provinsi dan 86 kabupaten/kota, pilkada di Indonesia tidak lebih dari sekedar unjuk kekuatan politik masing-masing di daerah. Kekuatan yang ditunjukkan termasuk di dalamnya politik uang.

Hasil analisis empiris juga membuktikan bahwa masih banyak variabel-variabel lain yang memengaruhi transisi dalam pasar kerja. Menurut Gunawan (2017), upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N).

Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada indikasi bahwa pasar tenaga kerja berpola *monopsony*. Pasar *monopsony* berlaku pada saat upah pasar meningkat mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Ada kemungkinan tingginya ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan untuk membayar pekerja sebesar upah minimum atau lebih tinggi, sehingga kenaikan upah minimum tidak berdampak besar terhadap transisi ke sektor formal. Sektor informal menjadi sektor yang tidak “menarik” akibat kenaikan upah minimum, karena dampak upah minimum terhadap transisi ke sektor informal negatif dari apapun statusnya saat t-1, sedangkan transisi informal ke informal tidak berdampak pada upah minimum. Ini membuktikan bahwa di Indonesia upah minimum tidak membuat upah di sektor informal meningkat.

Jika dilihat secara keseluruhan per kelompok berdasarkan variabel, dapat diketahui bahwa pengaruh utama dari seseorang bertransisi antar sektor berasal dari dalam diri sendiri. Hasil analisis empiris memperlihatkan bahwa kelompok pada variabel mikro hampir seluruh transisinya signifikan, sementara untuk variabel makro lebih sedikit.

## KESIMPULAN

Analisis empiris memperlihatkan pengaruh pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota signifikan terhadap transisi tenaga kerja dari tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N), tidak bekerja ke informal (N ke I), tidak bekerja ke formal (N ke F), formal ke formal (F ke F), formal ke informal (F ke I), dan formal ke tidak bekerja (F ke N), sedangkan pengaruhnya tidak signifikan pada transisi informal ke tidak bekerja (I ke N), informal ke informal (I ke I) dan informal ke formal (I ke F).

Secara umum, pilkada tingkat kabupaten/kota semakin memperluas kesempatan kerja, baik itu pada sektor formal dan informal. Meskipun begitu, secara peluang sektor informal memberikan kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan

sektor formal. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor lain, baik itu dari variabel makro maupun mikro. Jika dilihat berdasarkan hasil analisis empiris membuktikan bahwa transisi dalam pasar kerja lebih dipengaruhi oleh umur, pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan dari masing-masing tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11, 289–319. doi: 10.1108/17506200710779521
- Bosch, M., & Esteban-Pretel, J. (2012). Job creation and job destruction in the presence of informal markets. *Journal of Development Economics*, 98(2), 270–286. doi: 10.1016/j.jdeveco.2011.08.004
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press. [http://doi.org/10.1016/S0304-4076\(00\)00050-6](http://doi.org/10.1016/S0304-4076(00)00050-6). Analysis (Vol. 100). doi: 10.1016/S0304-4076(00)00050-6
- Charles, K. K., & Stephens, M. (2013). Employment, Wages, and Voter Turnout. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(4), 111–143. doi: 10.1257/app.5.4.111
- Choi, N. (2011). *Local politics in Indonesia : pathways to power*. Routledge contemporary Southeast Asia series. doi: 10.1080/00472336.2012.721664
- Gunawan, B. T. (2010). *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Employment Transition: Analisis Level Individu di Pulau Jawa*. Depok: Tesis Universitas Indonesia.
- Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor & Development*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-4>
- Husmanns, R. (2004). *Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment*. Working Paper. diunduh dari: <http://purochioe.rojasdatabank.info/informalsecio2004.pdf>

- ILO, Ayyagari, M., Albert, Wu, Y., & Du, Y. (2013). *Informal Employment in Urban China: Measurement and Implications*.
- Jespersen, S. T., Munch, J. R., & Skipper, L. (2008). Costs and benefits of Danish active labour market programmes. *Labour Economics*, 15(5), 859–884. doi: 10.1016/j.labeco.2007.07.005
- Lewis-Beck, M. S., & Paldam, M. (2000). Economic voting: an introduction. *Electoral Studies*, 19(2–3), 113–121. doi: 10.1016/S0261-3794(99)00042-6
- Mankiw, N. . G. (2001). The Inexorable and Mysterious Tradeoff between Inflation and Unemployment. *The Economic Journal*, 111(471), C45–C61. doi: 10.1111/1468-0297.00619
- Mechtel, M., & Potrafke, N. (2013). Electoral cycles in active labor market policies. *Public Choice*, 156(1–2), 181–194. doi: 10.1007/s11127-011-9890-z
- Meyn, S. P., & Tweedie, R. L. (1993). Markov Chains and Stochastic Stability. *Springer-Verlag*, 792. doi: 10.2307/2965732
- Mueller, D. C. (2003). *Public Choice III. International Journal of Social Economics* (Vol. 30). doi: 10.1108/03068290310492896
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*. doi: 10.2307/2296528
- Rinakit, S. 2005. *The Indonesian Military After The New Order*. Singapore: ISEAS.
- Rogoff, K. (1990). Equilibrium Political Budget Cycles. *The American Economic Review*, 80(1), 21–36. doi: 10.3386/w2428
- Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: Do they differ across countries and why? *Journal of Public Economics*, 90(8–9), 1367–1389. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.09.009>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Ulyssea, G. (2010). Regulation of entry, labor market institutions and the informal sector. *Journal of Development Economics*, 91(1), 87–99. doi: 10.1016/j.jdeveco.2009.07.001

